



Bom Waktu Ancaman Longsor

■ Struktur Tanggul Terancam Penambangan Pasir

YOGYA. TRIBUN - Kegiatan penambangan pasir di aliran Sungai Code dinilai sebagai salah satu pemicu "bom waktu" tanggul longsor di sungai berhulu di Gunung Merapi ini. Bahkan, kegiatan yang dilakukan warga sekitar Code ini diibaratkan seperti menggali lubang di fondasi rumahnya sendiri.

Koordinator Komunitas Code X, Dodit D Wasisto-adi mengatakan, kegiatan penambangan pasir masih menjadi favorit sebagian warga bantaran Code sebagai penghasil keluarga. Tak heran, bila banyak warga yang masih bertahan dengan mengumpulkan material Gunung Merapi yang terbawa hingga ke aliran Sungai Code.

Parahnya, berdasarkan pantauan Komunitas Code X, ternyata kegiatan penambangan makin mengarah ke tepian sungai. Hal ini dinilai membahayakan, lantaran berpotensi membuat bangunan tanggul berubah.

"Kalau sampai penambangan pasir dilakukan hingga di dekat fondasi tanggul, sangat mungkin menyebabkan tanggul longsor, sama yang terjadi di beberapa titik di aliran Code. Apalagi, dengan kepadatan pemukiman yang ada di sekitar tanggul Code," ungkap dia. Sayangnya, hal ini kurang disadari warga. Menurut dia, saat ditingkatkan, warga justru cenderung acuh karena arus sungai tak deras.

Dodit menjelaskan kegiatan penambangan di Code paling sering dilakukan saat musim kemarau, lantaran penambang lebih leluasa penambang di arus sungai yang menyusut. Hal ini juga

Sudah sering kami sampaikan kepada masyarakat. Apalagi, jika penambangan yang dilakukan terlalu dalam.

sudah diwanti-wanti Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Hari Wahyudi yang menyebutkan, penambangan dapat menyebabkan struktur yang menepal di sungai berubah dan dikhawatirkan akan memicu longsor.

Pihaknya pun sudah mengimbau masyarakat yang tinggal di bantaran agar tak menambang pasir di aliran Code. "Sudah sering kami sampaikan kepa-

da masyarakat. Apalagi, jika penambangan yang dilakukan terlalu dalam hingga menyebabkan runtuhan pada talud dan bisa longsor. Saat ini, hampir semua talud punya potensi longsor karena kegiatan penambangan," paparnya.

Berbeda penambang pasir Sungai Boyong yang mengharuskan warga berjalan jauh dari rumahnya untuk sekadar mencari pasir, penambang di Code relatif lebih diuntungkan. Meski harganya tak semahal di Boyong, pasir hasil tambang Code dihargai Rp6.000 per kantong ukuran 25 kilogram, penambang Code lebih diuntungkan karena proses mencari pasir yang mudah.

Seorang penambang di Kampung Prawirodirjan, Tugman (69) mengaku, bisa mengumpulkan hingga 30 karung pasir setiap hari. Menurutnya, dengan kondisi fisik yang sudah renta,

30 kantong itu cukup untuk menutupi kebutuhannya. "Kalau masih muda ya bisa lebih. Dulu selain menambang, juga kerja lainnya. Cari pasirnya hanya sambilan, kalau ada waktu senggang," ujarnya.

Endapan material di Code pun bisa dibilang melimpah. Bahkan semakin ke tepi, kualitas pasir masih bagus. Penambang pun tak perlu repot-repot mengayak untuk mendapatkan pasir halus.

Kondisi ini membuat banyak penambang terguru untuk menambang di dekat tanggul. Ditambah, banyak yang mencari pasir hasil tambang Code, lantaran kualitasnya yang dianggap bagus untuk bahan bangunan.

"Banyak yang cari, jadi berapapun yang ditambang selalu dibeli pengepul," kata Tugman sembari mengumpulkan pasir yang sudah diendapkan di pinggir tanggul. **(ang)**

✓ Dim. PUPKP
✓ BPBD

Yogyakarta,
 Ptl. Kepala Sekretaris
 Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19600723.199603.1.005

Kosongkan Tiga Meter

PASCAAMBROLNYA talut di daerah Prawirodirjan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) akan melakukan penataan kawasan Kali Code.

Kepala Dinas PUPKP, Agus Tri Haryono mengatakan untuk melakukan membutuhkan kesepakatan dengan masyarakat terlebih dahulu. Rencananya pihaknya akan bertemu dengan perwakilan Prawirodirjan awal tahun depan. "Talut yang kemarin ambrol itu sudah kami lakukan penanganan darurat dengan bronjong, yang penting kami sudah ada penanganan darurat dulu supaya tidak ambrol," katanya, Selasa (11/12).

"Daerah itu kan sempadan dan tanah uruk, rumah yang di sana itu juga bukan rumah huni. Rumah yang di sana itu untuk usaha, ada bengkel, warung soto. Ya, makanya kita menata, tapi tentu perlu kesepakatan dengan masyarakat," sambungnya.

Jika sudah mencapai kesepakatan, pihaknya akan mengosongkan kawasan sungai dengan lebar tiga meter. Rencananya Dinas PUPKP akan membuat pedestrian. "Ya, kalau menurut aturan kan memang daerah itu bebas dari bangunan. Morfologi Kali Code kan landai, di situ posisinya tanah uruk. Harusnya kan memang tidak boleh ada ruang air. Urgennya di situ, tanah harus distabilkan," jelasnya.

Ia menambahkan pedestrian tiga meter tersebut merupakan jalan inspeksi untuk membuat jarak dengan sungai. Meski demikian kesepakatan dengan warga adalah hal yang utama. "Kalau sudah ada kesepakatan dengan warga kami akan menyiapkan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP). Ya, nanti awal 2019 baru ketemu dengan warga dulu. Harapannya nanti bisa dilakukan penataan di kawasan itu," tambahnya. **(maw)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPBD	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005